

Pembantaian Ambon dan Sengketa Rempah Global Abad XVII

Epifania Puspo Diati Ernawan

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia.

Korespondensi: Epifania Puspo Diati Ernawan [epifania.puspo.2407326@students.um.ac.id]

Kata Kunci: pembantaian ambon; east india company; vereenigde oostindische compagnie

ABSTRACT

This article discusses the long-term impact of the 1623 Amboyna Massacre on the dynamics of trade, diplomacy, and memory construction between England (EIC) and the Netherlands (VOC) in the archipelago until the early 20th century. The historical research method of Kuntowijoyo (2013) which includes five steps in the form of theme determination, heuristics, source verification, interpretation, and historiography was used to examine the changes in trade strategies and diplomatic relations between the two companies after the incident. The results of the study show that this tragedy has accelerated the shift in the EIC trade pattern from Maluku to other regions in Asia, while the VOC strengthened its military control over the spice route. The post-tragedy conflict also shaped more aggressive and competitive diplomatic policies from both parties. In addition, the Ambon tragedy became a symbol in public narratives and official documents that conflicted, both as a form of legitimacy of power and as a propaganda tool, both from the Dutch and British side. This finding shows that the scale of the Ambon Massacre was an important turning point in the history of the spice trade and the politics of memory in the Nusantara region in the 17th century

ABSTRAK

Artikel ini membahas dampak jangka panjang Tragedi Pembantaian Ambon (yang pada saat itu disebut Amboyna) pada tahun 1623 terhadap dinamika perdagangan, diplomasi, dan konstruksi memori antara Inggris melalui East India Company (EIC) dan Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Nusantara hingga awal abad ke-20. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah Kuntowijoyo (2013) yang mencakup lima tahapan berupa penentuan tema, heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menelaah perubahan strategi dagang dan hubungan diplomatik kedua perusahaan setelah insiden tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tragedi ini mempercepat pergeseran pola perdagangan EIC dari Maluku ke wilayah lain di Asia, sementara VOC memperkuat kontrol militernya atas jalur rempah. Konflik pasca-tragedi juga membentuk kebijakan diplomatik yang lebih agresif dan kompetitif dari kedua belah pihak. Selain itu, Tragedi Pembantaian Ambon menjadi simbol dalam narasi publik dan dokumen resmi yang saling bertentangan, baik sebagai bentuk legitimasi kekuasaan ataupun sebagai alat propaganda dari pihak Belanda dan pihak Inggris. Temuan ini memperlihatkan bahwa skala cakupan Tragedi Ambon sebagai titik balik penting dalam sejarah perdagangan rempah dan politik memori di kawasan Nusantara pada abad ke-17.

1 | Pendahuluan

Pada bulan Desember 1623, dewan East India Company (EIC) di Batavia menyusun sebuah laporan yang isinya berhasil membuat terkejut para petinggi EIC di London. Pasalnya, pada bagian akhir laporan tersebut, diinformasikan bahwa sepuluh karyawan EIC telah dieksekusi dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Amboyna Massacre—sebuah ‘pembantaian berdarah’ dan ‘eksekusi bengis’ oleh

para ‘kanibal’ Belanda (Games, 2020: 76). Menurut catatan kontemporer, para karyawan tersebut dipaksa bersumpah di bawah penyiksaan sebelum dihakimi dan dieksekusi atas tuduhan makar terhadap VOC (Clulow, 2007; Smith, 2018). Insiden ini menajamkan persaingan antara EIC dan VOC di Kepulauan Maluku, sehingga EIC memutuskan mengalihkan fokus perdagangan rempah-rempahnya menuju pantai timur India (Mishra,

2018). Secara diplomatik, Tragedi Ambon memicu ketegangan Anglo-Belanda hingga tercapainya Perjanjian Westminster pada tahun 1654, sekaligus menjadi dasar klaim kompensasi oleh Inggris di Eropa (Games, 2021). Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak jangka panjang peristiwa tersebut terhadap interaksi strategis dan politik antara EIC dan VOC di Nusantara sepanjang abad ke-17.

Sejumlah studi tentang Tragedi Pembantaian Ambon umumnya berfokus pada aspek hukum dan prosedural—terutama mekanisme pengadilan VOC dan pelaksanaan hukuman terhadap karyawan EIC sebagaimana dianalisis oleh Clulow (2007), serta pada cara kedua perusahaan membangun narasi politik melalui pamflet dan laporan resmi (Smith, 2018; Games, 2020). Pada tahun 1500-1700, pamflet merupakan cara yang murah dan efisien dalam menyebarkan informasi (Hanssen, 2023). Namun, penelitian yang mengurai dampak jangka panjang peristiwa ini terhadap pola perdagangan rempah di Nusantara dan memori kolektif masyarakat Maluku yang tercatat dalam Hikayat Tanah Hitu yang ditulis ulang oleh Manusama (1977)—serta implikasinya pada kebijakan dagang dan diplomasi EIC maupun VOC hingga dekade awal abad ke-20—masih sangat terbatas (Rabani, Sarkawi, & Khusyairi, 2022).

Padahal, pemahaman menyeluruh tentang dinamika tersebut penting untuk merekonstruksi strategi persaingan kolonial dan politik ingatan di kawasan Maluku (Games, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada persaingan dan sengketa perdagangan rempah antara Inggris (EIC) dan Belanda (VOC), terlebih sebagaimana tercermin dalam Tragedi Pembantaian Ambon 1623. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Kehadiran awal Belanda dan Inggris di Maluku; (2) Narasi pembantaian Ambon dari sudut pandang Inggris dan Belanda; serta (3) Persaingan dan sengketa perdagangan rempah antara Inggris dan Belanda pada abad ke-17.

2 | Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi lima langkah penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo (2013), yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap pemilihan topik, ruang kajian difokuskan pada Tragedi Pembantaian Ambon dan interaksi EIC-VOC di Nusantara Abad ke-20. Tahap heuristik berfokus dalam pengumpulan sumber primer yang berasal dari catatan-catatan Inggris, Belanda, dan lokal. Selanjutnya, pada tahap verifikasi, setiap sumber ditelaah melalui kritik eksternal dan internal untuk memastikan keaslian, otentisitas, dan

kredibilitas data. Fakta yang terkumpul dan telah siap untuk digunakan itu belum berguna, jika belum diberi arti (Alian, 2012). Maka dari itu, perlu adanya tahap interpretasi yang dilakukan dengan penerapan analisis kontekstual dan sintesis temuan guna mengungkap pola perubahan strategi perdagangan dan kebijakan diplomatik pasca-peristiwa. Terakhir, pada tahap historiografi, penulisan narasi sejarah disusun secara sistematis dan koheren, mengintegrasikan data empiris ke dalam kerangka teoritik yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3 | Hasil dan Pembahasan

Awal Kedatangan Belanda dan Inggris di Maluku



Gambar 1. Peta Pulau Ambon
Source: (Manusama, 1971).

Kepulauan Maluku sebagai Spice Islands sangat diminati bangsa Eropa karena menyediakan rempah-rempah langka, seperti cengkeh yang hanya tumbuh alami di Maluku, sedangkan pala dan bunga pala hanya tumbuh di Kepulauan Banda (Nierstrasz, 2022). Kedatangan Belanda di Maluku pada pergantian abad ke-17 dilatarbelakangi oleh motivasi menguasai perdagangan rempah. Pada abad ke-17, ekspedisi Belanda berhasil mengadakan aliansi dengan Kerajaan Hitu di Ambon untuk melawan Portugis. Hasilnya, Kerajaan Hitu memperoleh kemenangan atas Portugis, dan memberikan izin bagi Belanda untuk mengambil alih benteng milik Portugis yang kemudian dinamai Benteng Victoria (Wijaya & Wahyudi, 2023).

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting yang mendorong pendirian Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602, sebagai badan usaha Belanda untuk memantapkan monopoli rempah dan menghadapi persaingan dengan kongsi dagang Eropa lainnya (Mansyur, 2013). Dalam praktiknya, Belanda (melalui VOC) menggunakan politik imperialis, yang mana mereka menawarkan bantuan bagi kerajaan lokal dengan mengganti tanah yang

dijadikan sebagai koloni baru VOC (Wijaya & Wahyudi, 2023).

Sementara itu, Inggris datang ke Maluku sebagai bagian dari perluasan jaringan perdagangan Asia Tenggara. Setelah mendirikan Kongsi Dagang Inggris (East India Company yang selanjutnya disingkat EIC) pada tahun 1600, Inggris mengirim armada dagang ke Asia Tenggara untuk menyaingi monopoli rempah yang sudah dikuasai Belanda melalui VOC (Sinaga et al., 2024). Ketika armada Inggris tiba di Maluku, konflik dengan Belanda segera muncul. VOC memandang kehadiran EIC sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangan mereka. Konflik antara keduanya terus memuncak hingga terjadinya Tragedi Pembantaian Ambon pada 1623, yang mana sejumlah pekerja Inggris disiksa dan dibantai atas tuduhan pengkhianatan terhadap Belanda sebagaimana tercatat dalam Hikayat Tanah Hitu karangan Ridjali yang disunting oleh Z. J. Manusama (1977).

Narasi Tragedi Pembantaian Ambon dari sudut pandang Inggris dan Belanda

Tragedi Ambon meninggalkan jejak yang kuat dalam dokumen-dokumen dan narasi publik abad berikutnya, khususnya di pihak Inggris dan Belanda. Di pihak Inggris, insiden ini menjadi simbol kezaliman Belanda. Perusahaan Inggris bahkan menerbitkan pamflet resmi yang menggambarkan penyiksaan di Ambon dengan rinci. Sebagai contoh, EIC mencetak ulang brosur laporan kejadian itu sebagai A Memento for Holland pada tahun 1652 untuk mempermalukan VOC. Dalam sastra populer Inggris, "Amboyna, or the Cruelties of the Dutch to the English Merchants" yang ditulis oleh Dryden (1673)—yang juga ditampilkan sebagai karya teatral bertajuk Amboyna: A Tragedy—secara jelas mengabadikan tragedi Ambon sebagai propaganda anti-Belanda (Alazraki, 2022). Lakon tersebut menggambarkan peristiwa itu sebagai tindakan kejam yang menjadikan para korban—terutama kapten Gabriel Towerson—yang digambarkan sebagai protagonis dan martir Inggris yang heroik (Alazraki, 2022). Demikian pula, penulis Inggris abad ke-18, seperti Jonathan Swift, juga menyinggung kekejaman VOC di Ambon dalam karyanya, Gulliver's Travels (1887). Hal ini menegaskan adanya fakta bahwa peristiwa ini terpahat dalam ingatan kolektif Inggris sebagai pembantaian keji. Bahkan, Bruin (2018) menyebut sikap dan tanggapan Inggris terhadap tragedi ini sebagai suatu bentuk kebencian atau rasa takut yang berlebih terhadap Belanda (Hollandophobia).

Sebaliknya, narasi publik Belanda lebih menekankan aspek konspirasi dan prosedural. Dalam dokumen resmi VOC maupun historiografi Belanda, peristiwa Ambon sering diceritakan sebagai tindakan pencegahan atas pengkhianatan (meski kemudian dipertanyakan kebenarannya). Penulis Belanda di abad berikutnya jarang menyebutnya sebagai "Massacre" secara eksplisit. Mereka cenderung menggambarkannya sebagai 'penegakan hukum VOC di Benteng Ambon yang dijalankan sesuai keyakinan pejabat Belanda' (Baas, 2021). Sejarawan modern mencatat bahwa perspektif Belanda menekankan motif politik Inggris, sementara perspektif Inggris menekankan keadilan yang dilanggar. Perbedaan narasi dalam sudut pandang Belanda tercermin pada salah satu kolom berita koran de Locomotief terbitan 30 Maret 1917 yang bertajuk "Hollandsche taatheid en een Britsch fiasco" ("Kegigihan Belanda dan Kegagalan Inggris"). Dalam artikel ini, dapat dilihat bagaimana respon Belanda memandang Inggris sebagai pihak yang tidak kompeten dalam memenuhi traktat dagang antara Belanda dan Inggris, sembari mengkritisi pergerakan Inggris di Maluku, Ambon, Banda, hingga



Batavia.

Gambar 2. Ilustrasi Penyiksaan dan Pembantaian Ambon yang dimuat dalam dokumen Inggris
Source: (Harris, 1744)

Persaingan dan Sengketa Perdagangan Rempah Antara Inggris dan Belanda pada Abad ke-17

Sebelum tahun 1623, Inggris (EIC) dan Belanda (VOC) sebenarnya sempat mencoba membagi wilayah rempah. Misalnya, Perjanjian Pertahanan 1619 menetapkan pembagian hasil rempah di Maluku, yang mana EIC menerima sepertiga hasil rempah Maluku (Sen, 2019). Namun, ketegangan di antara keduanya sangat tinggi. Pembantaian Ambon 1623 (eksekusi 21 orang, termasuk 10 pedagang EIC) menandai puncak konflik tersebut yang membuat pemerintah dan perusahaan EIC sangat terpukul. Berita pembantaian ini menimbulkan amarah di Inggris dan dijadikan alasan bagi EIC untuk mengalihkan perhatian ke perdagangan di India (Baas, 2021). Dengan kata lain, Inggris mulai lebih fokus ke sumber rempah lain, seperti perdagangan lada di India, sebagai alternatif setelah tragedi tersebut terjadi. Sebaliknya, VOC memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan monopoli rempah di Kepulauan Maluku. VOC memperkuat kendali dengan membangun benteng di Maluku dan menindas perlawanan lokal sehingga kendali rempah VOC di Nusantara diperkuat pasca-Ambon (Baas, 2021; Sinaga et al., 2024).

Sebagai dampaknya, pola perdagangan rempah berubah. VOC secara de facto mengambil alih perdagangan pala dan cengkeh di Maluku, sementara EIC secara praktis tersingkir dari kawasan itu. Untuk tetap mengakses rempah, EIC kemudian menjalin aliansi dagang dengan kerajaan-kerajaan lokal di bagian barat Nusantara, misalnya dengan memperkuat hubungan diplomatik dengan Kesultanan Banten agar bisa mengurangi monopoli VOC dan memperluas akses rempah ke pasar global (Sinaga et al., 2024). Dengan kata lain, EIC mengalihkan jaringan perdagangannya ke wilayah barat Nusantara (di luar Maluku), sembari terus memperdalam transaksi rempah di India. Kendati demikian, Bassett (1960; dalam Hanssen, 2023) berargumen bahwa tragedi ini tidak sepenuhnya menyingkirkan Inggris dalam jaringan perdagangan Maluku; dan bahwa perdagangan antara keduanya tetap terjalin lama Tragedi Pembantaian Ambon. Di sisi lain, VOC berhasil mengintensifkan kebijakannya, seperti monopoli rempah yang sudah dibangun sebelumnya semakin kokoh, apalagi setelah mengusir musuh Inggris di Pulau Banda (misalnya dengan merebut Pulau Run) dan mengamankan lahan rempah. Hasilnya, sampai pertengahan abad ke-17, VOC berhasil memonopoli hampir seluruh rempah utama di Maluku, sementara EIC hanya beroperasi terbatas (Baas, 2021; Sinaga et al., 2024).

Dari sudut pandang VOC, pembantaian Ambon justru membenarkan hak monopoli Belanda. Mereka beranggapan para pedagang Inggris tidak berhak menyaingi penguasaan VOC atas rempah-rempah

Nusantara. Seperti dicatat, VOC berpandangan Inggris “tidak memiliki klaim atas rempah” dan segala upaya Inggris di Maluku adalah pelanggaran (Baas, 2021). Sebaliknya, EIC bersikukuh bahwa VOC seharusnya berterima kasih kepada Inggris atas bantuan militer dalam konflik Eropa sebelumnya. Hal ini menyebabkan Inggris merasa berhak atas bagian rempah seperti dalam perjanjian 1619. Sebagai akibatnya, pola perdagangan rempah bergeser jelas pasca Tragedi Pembantaian Ambon. Inggris (EIC) semakin intensif di jalur laut barat (India dan Nusantara bagian Barat), sedangkan Belanda (VOC) menguasai rantai perdagangan rempah di bagian timur Nusantara. Perbedaan perspektif inilah yang kemudian mewarnai interpretasi sejarah rempah di kedua belah pihak.

Tragedi Ambon juga mendorong kedua perusahaan bersaing secara diplomatik. EIC menuntut ganti rugi dan penegakan keadilan melalui pemerintah Inggris, sementara VOC mengandalkan pemerintah Republik Belanda. Ketegangan akhirnya dapat diselesaikan lewat jalur diplomasi internasional, yakni Perjanjian Westminster 1654 (Davenport, 2004: 42). Isi dari Perjanjian Westminster menetapkan arbitrase (praktek memanfaatkan perbedaan antara dua atau lebih harga pasar) yang memerintahkan VOC membayar ganti rugi sebesar £85.000 kepada EIC atas jatuhnya para pedagang Ambon (Bruce, 1810: 72). Meskipun VOC awalnya menolak tuduhan pembantaian, tekanan diplomatik dan tekanan Inggris membuat Belanda akhirnya menerima ketetapan tersebut. Dengan kata lain, konflik diselesaikan lewat negosiasi tingkat tinggi antara pemerintah dua negara, bukan lewat pertempuran langsung di Nusantara.

Selain penyelesaian finansial, trauma Ambon juga mempengaruhi kebijakan diplomatik regional. EIC misalnya semakin giat membangun aliansi politik dengan kerajaan-kerajaan lokal Nusantara agar bisa menghadapi dominasi VOC. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Inggris mendukung kapal dagangnya berlabuh di pelabuhan Banten dan kerajaan lain untuk mengurangi ketergantungan pada Maluku. Di sisi lain, VOC semakin mengokohkan posisinya dengan cara militer dan diplomasi bersama penguasa setempat. Banyak kesultanan di Nusantara (misalnya Banten, Mataram) merasa harus memilih bersekutu dengan salah satu pihak agar selamat (Sinaga et al., 2024). VOC, dengan angkatan bersenjata yang lebih kuat, berhasil menundukkan beberapa penguasa lokal dan memperluas wilayah kekuasaan, khususnya di Maluku melalui kontrol ketat atas komoditas rempah (Sinaga et al., 2024).

Dalam kebijakan diplomatik pasca-Ambon, EIC memperkuat narasi bahwa VOC telah melanggar

perjanjian dan menuntut pertanggungjawaban. EIC bahkan menerbitkan brosur dan pamflet yang menggilas citra VOC, sehingga insiden Ambon menjadi alasan moral dalam literatur Inggris masa itu. Di pihak VOC, pejabat Belanda cenderung bersikap formal, yang mana mereka mengklaim penanganan kasus Ambon sudah melalui prosedur hukum VOC di lapangan, dan berpegang pada interpretasi perjanjian 1619 yang mengizinkan VOC mengadili sendiri semua yang berada di bentengnya (Bruin, 2018). Dengan kata lain, hubungan diplomatik kedua perusahaan setelah Ambon dilakukan dalam ketegangan. Inggris menggunakan tekanan politik (dan bahkan perang) untuk menuntut kompensasi, sedangkan VOC mempertahankan kekuasaannya sambil sedikit demi sedikit menuruti syarat arbitrase guna meredakan konflik.

Hingga awal abad ke-20, memori kolektif Peristiwa Ambon masih hidup dalam literatur kolonial dan arsip pemerintahan. Dokumen resmi, seperti traktat Westminster dan traktat Breda mencatat penyelesaian diplomatik tragedi tersebut. Narasi publik pun tersimpan dalam arsip surat kabar, laporan dari pelancong, dan sejarah kolonial Hindia Belanda maupun Inggris. Meski peristiwa ini kemudian kian jarang muncul dalam narasi sehari-hari bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, studi sejarah modern (misalnya dalam penelitian Clulow, 2019; atau Games, 2020) menegaskan bahwa tragedi Ambon telah menjadi bagian dari ingatan kolonial Inggris dan Belanda (Baas, 2021; Alazraki, 2022). Sebagai konklusi, baik dalam dokumen resmi maupun cerita publik, Tragedi Ambon terus diabadikan sebagai simbol perseteruan antara pihak EIC dan VOC, yang mana sering dijadikan simbol representasi masing-masing pihak dalam sejarah perdagangan rempah di Nusantara.

4 | Kesimpulan

Tragedi Pembantaian Ambon tahun 1623 menjadi titik balik dalam hubungan dagang dan diplomatik antara East India Company (EIC) dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Nusantara. Dalam aspek perdagangan, insiden ini mempercepat pergeseran EIC dari Maluku ke jalur dagang alternatif di India dan pantai barat Nusantara, sementara VOC semakin meneguhkan monopoli rempah dengan dukungan kekuatan militer dan kontrak eksklusif (Clulow, 2007). Secara diplomatik, konflik pasca-Ambon memaksa kedua perusahaan untuk menggabungkan strategi hukum, militer, dan propaganda. Hal ini tercermin dalam arbitrase Perjanjian Westminster 1654, juga dokumen dan karya-karya propaganda yang memperkuat klaim masing-masing pihak. Di ranah memori kolektif,

peristiwa ini terus dikenang dalam dokumen resmi dan materi sastra—sebagai simbol kekejaman VOC dalam karya Inggris maupun sebagai penegakan hukum dalam narasi Belanda—hingga menjadi bahan kajian tentang kekuasaan dan ingatan kolonial di abad ke-20 (Games, 2020). Dengan demikian, Tragedi Pembantaian Ambon tidak hanya mengguncang peta perdagangan rempah, tetapi juga membentuk cara Eropa dan Nusantara memahami dan menuliskan sejarah kolonialisme. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap studi kolonialisme, memori kolektif, dan bagian dari historiografi perdagangan rempah Nusantara yang masih jarang tersorot dalam narasi sejarah. Sebagai penutup, penulis menyampaikan saran untuk dapat diadakannya kajian lebih lanjut terkait peran pedagang dan tentara (*mercenaries*) Jepang dalam dinamika interaksi Inggris dan Belanda di Maluku.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Daya Negri Wijaya, S.Pd, M.A. selaku pembimbing dalam penulisan artikel ini, juga rekan-rekan penulis yang memberi dukungan dan dorongan bagi penulis selama proses pembuatan artikel ini, terlebih bagi saudara Theresia Cantika Rosari.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

Referensi

Alazraki, M. (2022). "To guard this Paradise from any second violation": *Ysabinda and the Eastern female body as contested territory in Dryden's Amboyna (1673)*. XVII-XVIII. *Revue de La Société d'études Anglo-Américaines Des XVIIe et XVIIIe Siècles*, 79, Article 79.

Alian, A. (2012). Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Sejarah (Criksetra)*, 2(2), 1-14.

Bass, (n.d.) (1975). *Ambon 1623/Banda 1621. Dutch & British Colonial History Revisited*. Leiden: International Institute for Asian Studies.

Basset, D.K. (1960). The "amboyna massacre" of 1623. *Journal of Southeast Asian History*, 1(2), 1-19.

Bruce, J. (1810). *Annals of the Honorable East-India Company: From their establishment by the charter of Queen Elizabeth 1600 to the union of the London and English East-India Company*. London: Black, Perry, and Kingsbury.

- Bruin, L. de. (2018). *Defaming the Dutch: The discourse of Hollandophobia in early modern England (1652 – 1690)*. Leiden: University of Leiden.
- Chulow, A. (2007). Unjust, Cruel and Barbarous Proceedings: Japanese Mercenaries and the Amboyna Incident of 1623. *Itinerario*, 31(1), 15-34.
- Chulow, A. (2018). *The Dutch and English East India Company: Diplomacy, Trade and Violence in Early Modern Asia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Davenport, F.G. (2004). *European Treaties Bearing on the History of the United States and Its Dependencies*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Games, A. (2020). *Inventing the English Massacre: Amboyna in History and Memory*. Oxford: Oxford University Press.
- H, v. (1917). Gevonden in Delpher-De. *De Locomotief*. <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMSPOM01:003155043:00001>
- Hanssen, L.M.D. (2023). *A Historiography of the Amboyna Massacre: How Nationality Affects the Writing of History*. Nord Universiteit.
- Harris, J., Campbell, J., Kitchin, T., Bowen, E., Gucht, M. van der, King-Harman, L. H. (1744). *Navigantium atque itinerantium bibliotheca, or, A complete collection of voyages and travels: Consisting of above six hundred of the most authentic writers*. London: Printed for T. Woodward, A. Ward, S. Birt, D. Browne, T. Longman, R. Hett, C. Hitch, H. Whitridge, S. Austen, J. Hodges, J. Robinson, B. Dod, T. Harris, J. Hinton, and J. Rivington
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Mansyur, S. (2013). Perdagangan Cengkih Masa Kolonial dan Jejak Pengaruhnya di Kepulauan Lease. *KALPATARU*, 22(1), 43-60.
- Manusama, Z.J. (1977). *Hikayat Tanah Hitu*. Leiden: University of Leiden.
- Mishra, R. (2018). *The Dutch East India Company and Amboyna: Crisis and Response in the Company*. In *A Business of State*. Harvard: Harvard University Press.
- Nierstrasz, C. (2022). *East India Company*. Europäische Gesichte Online.
- Rabani, L. O., Husain, S. B., & Khusyairi, J. A. (2022). Spices, Colonialism, and the Growth of New Economic Centers on the East Coast of East Sulawesi, 1620s—1920s. *MOZAIK HUMANIORA*, 22 (2), 219–230.
- Sen, A. (2019). Ysabinda and the Spice Race: Reading the Body and the Indian Ocean World in Dryden's Amboyna. *Postcolonial Text*, 14(3 & 4), 1-15.
- Sinaga, R., Fahlevi, T. R., Lumbantoruan, R. G., & Berutu, H. (2024). Kongsi Dagang Inggris (EIC) dan Belanda (VOC): Pengaruhnya dalam Jaringan Perdagangan Antar Benua. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 521-528.
- Smith, E. J. (2018). Reporting and Interpreting Legal Violence in Asia: The East India Company's Printed Accounts of Torture, 1603-1624. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 46(4), 603-626
- Swift, J. (1887). *Gulliver's Travels*. United Kingdom: G.P. Putham's Sons.
- Wijaya, D.N., Wahyudi, D.Y. (2023) *Nusa Ambon Silang Budaya Pertemuan Jaringan Global Abad XVI-XVII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.